



Antisipasi Penyalahgunaan Dana BOS

Kepala SD dan SMP Dikumpulkan

Denpasar (Bali Post) -

Mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa membuat kepala sekolah tersandung masalah hukum, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar Wayan Sukana mengumpulkan para Kepala SD dan SMP se-Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (8/2) kemarin.

Di hadapan puluhan kepala sekolah, Sukana mengingatkan dan menginstruksikan pihak sekolah harus benar-benar mengelola dana BOS sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dipersyaratkan. Dengan begitu, mereka tidak sampai berurusan dengan pihak berwajib di kemudian hari. "Pihak sekolah terutama kepala sekolah, kami minta membaca secara tuntas aturan-aturan tentang pengelolaan dana BOS supaya tidak keliru menggunakannya. Kalau mau aman, taati saja aturan yang ada. Peringatan ini saya tekankan kepada para kepala sekolah penerima BOS," ujar Sukana mengingatkan.

Sukana juga mengajak pihak sekolah, jangan segan dan malu berkonsultasi kalau ada hal yang tidak paham dalam mengelola dana BOS. Karena itu,

peran tim monitoring dan evaluasi (monev) BOS juga sangat vital dalam menangkal terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut. Oleh karena itu, pihaknya meminta Tim Monev BOS lebih proaktif turun ke lapangan guna melakukan pemantauan. Tidak bersifat pasif atau hanya menunggu laporan yang masuk dari masyarakat. "Ada atau tidak ada pengaduan dari masyarakat, Tim Monev BOS wajib turun ke lapangan," tegasnya.

Sukana juga meminta masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah ikut mengawasi pengelolaan keuangan sekolah. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sumber dana harus dicantumkan dengan jelas. Apakah bersumber dari dana BOS, APBD Provinsi, APBD Kota dan sebagainya. Jika sumber dana itu berasal dari dana BOS, apakah bentuk kegiatan itu sudah sesuai dengan rambu-rambu yang dipersyaratkan dalam buku panduan penggunaan dana BOS. "Jika rambu-rambu itu ditaati, kami rasa tidak akan pernah terjadi penyalahgunaan dana BOS, karena item-item penggunaannya sudah diatur secara jelas," pungkasnya. (kmb)

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017

Hal : 5



Puluhan Ribu KBS Bermasalah

Inspektorat Turun Tangan

Mangupura (Bali Post) -

Keterangan CV Sembe Dewata selaku pemenang tender perihal kesalahan Kartu Badung Sehat (KBS) tak sepenuhnya benar. Pasalnya, setelah dilakukan penghitungan ulang, ternyata ditemukan 25.642 kartu yang bermasalah. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi KBS yang dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa di ruang kerjanya, Rabu (8/2) kemarin.

Dalam rapat yang dihadiri Sekda Badung Kompyang R. Swandika dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) dr. Gede Putra Suteja tersebut, Suiasa mengatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan, Inspektorat turut turun tangan menelusuri masalah tersebut. "Kami sudah melakukan evaluasi. Sekarang, Inspektorat tengah melakukan penelusuran. Jadi, kita tunggu saja apa hasilnya," ujarnya.

Ditanya apa langkah Pemkab Badung menindaklanjuti temuan tersebut? Pejabat asal Desa Pecatu ini mengaku tidak mau berandai-andai sebelum ada laporan resmi dari Inspektorat. "Saya tidak mau melampaui wewenang dulu. Biarkan Inspektorat bekerja dulu. Set-

elah itu, baru diambil langkah selanjutnya," tegasnya.

Wabup Suiasa juga akan memanggil rekanan untuk meminta keterangan perihal program prestisius Bupati Badung dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi krama Badung tersebut. "Setelah ada laporan dari Inspektorat, baru kami akan memanggil pemenang tender. Untuk saat ini, biarkan Inspektorat bekerja dulu," ujarnya.

Kadiskes Badung dr. I Gede Putra Suteja saat ditemui usai rapat mengaku kecewa dengan pihak rekanan. "Saya kecewa dengan kasus ini. Dari 6.325 yang dikatakan salah, ternyata setelah ditelusuri lebih dari itu," ujarnya.

Dijelaskan, dari 464.622

kartu, terdapat 25.642 kartu tidak melakukan perekaman dan mencetak hanya berdasarkan NIK dan No. JKN. Di antaranya, 5.774 kartu salah alamat, 551 kartu di mana pemegang kartu sudah meninggal dan 19.317 kartu karena pemegang kartu belum melakukan perekaman. "Kesimpulannya, terdapat 25.642 kartu yang dicetak tidak melalui perekaman atau tidak sesuai prosedur kontrak," terangnya.

Menurut Putra Suteja, rekanan wajib mengembalikan material sejumlah Rp 280.523.480. Angka ini diperoleh dari jumlah kartu bermasalah dikalikan Rp 10.940. "Kerugian ini harus dikembalikan oleh rekanan karena merupakan kerugian negara," tegasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 9 Feb 2017

Hal : 3